

Sudah berhasilkah Penyuluhan Kehutanan di Provinsi Banten ?

Oleh : Usep Witarsa*)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang diprioritaskan dalam pembangunan. karena sumber daya manusia merupakan subsistem terpenting yang menggerakkan dan sekaligus melaksanakan pembangunan yang akan menentukan efektivitas dan efisiensi serta keberhasilan program pembangunan. Sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan semua program pembangunan lingkgan hidup dan kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. karena itu pengembangan sumber daya manusia mutlak perlu dan merupakan prioritas utama khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. selain itu sumber daya kehutanan yang besar dan menyebar di Provinsi Banten bila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi nyata



Hutan Rakyat

Pembangunan Lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Arah dan landasan pembangunan nasional pada kabinet kerja saat ini mengacu pada sembilan agenda prioritas pembangunan (NAWACITA) untuk Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada NAWACITA point sebagai berikut:

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.republik Indonesia. Kondisi pedesaan yang jauh dari keramaian perkotaan sangat rawan untuk dimasuki ideologi ymag tidak sejalan dengan tatanan negara RI, sehingga seyogyanya masyarakat pedesaan perlu di bangun dalam peningkatan ekonomi menuju ketahanan pangan, kemandirian dan kesejahteraannya



Budi daya jamur tiram

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama Bangsa-bangsa Asia lainnya. Hal ini dapat dilihat banyak produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa, inovasi teknologi produk diperlukan dalam membuat model dan design yang dapat dipasarkan secara global

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Hal ini sangat diperlukan agar komoditas impor dapat dikurangi sehingga peluang yang

besar akan dimiliki, untuk kepentingan ketahanan pangan maupun lainnya, bahkan mendorong untuk memungkinkan peningkatan ekspor guna penambahan devisa.



Pembuatan persemaian albasia.

Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan menunjukkan kearah perubahan pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pendekatan ekosistem Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga ke depan diarahkan untuk memberikan peran dan partisipasi aktif masyarakat secara professional. Oleh karena itu penyuluhan pada hakekatnya upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan pihak lainnya dalam pembangunan kehutanan dapat terwujud, maka penyuluhan memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kapasitas kemandirian masyarakat dan upaya pelestarian sumber daya alam serta sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu diharapkan dapat mendorong penguatan kelembagaan dan pendampingan kearah masyarakat mandiri yang berbasis pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup . Sejalan dengan enam kebijakan Kementrian lingkungan hidup dan Kehutanan yaitu : 1). Pemantapan kawasan hutan ; 2). Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS ; 3). Pengamatan hutan dan pengendalian

kebakaran hutan; 4). Konservasi keaneka ragaman hayati ; 5). Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan ; 6). Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan; Adapun focus kegiatan pada Renja Kemenhut 2017 adalah Transformasi pembangunan kehutanan dari mempertahankan dan memulihkan kawasan hutan menjadi memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati menjadi produk aktual di tahun 2015-2019, membutuhkan perubahan paradigma kearah pemangkuan kawasan hutan. Penguasaan terhadap potensi kawasan hutan (kayu, non kayu, , jasa lingkungan dan hasil hutan lainnya)

Program lingkungan hidup dan Kehutanan adalah pencapaian kelestarian fungsi hutan/kebun sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bertumpu pada pendekatan ekosistem Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga ke depan diarahkan untuk memberikan peran dan partisipasi aktif masyarakat secara professional.

Isue Kerusakan lingkungan akibat dari para pengguna yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air menjadikan bahan pemikiran semua pihak, karena dengan lingkungan yang rusak akan berakibat ancaman bagi kehidupan seperti halnya banjir, longsor di musim penghujan dan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan disaat musim kemarau.

Maka peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian alam sangat penting, karena masyarakatlah yang memiliki potensi besar untuk berperan dalam pelestarian sumber daya alam. Untuk menyikapi hal ini, salah satunya adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan, dengan harapan dapat digunakan sebagai sarana menuju keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mebuju rakyat sejahtera dengan tetap berwawasan lingkungan



Hasil olehan kayu rakyat

Di Provinsi Banten saat ini masih terdapat lahan yang kurang produktif lebih kurang 193.000 ha, merupakan lahan kritis dan potensi lahan kritis. Kondisi ini terjadi karena pengguna lahan tidak memperhatikan kaidah konservasi untuk meningkatkan produksi usaha tani. Para pengguna lahan umumnya para petani sebagai pelaku utama setempat yang tergolong petani kecil dengan penghasilan sedikit dan rata-rata memiliki pendidikan relatif rendah dan usaha tani masih berorientasi subsisten belum mengarah kepada tujuan Agribisnis.

Untuk mengatasi keadaan ini penyuluhan kehutanan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pelaku utama dan pelaku usaha, yang pada akhirnya para pelaku utama serta masyarakat tani lainnya dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pendayagunaan lahan dan pelestarian lingkungan, serta peningkatan produktifitas komodity Hasil Hutan Bukan Kayu. Disamping itu penyuluhan kehutanan merupakan salah satu langkah yang diambil dalam rangka menggali dan meningkatkan partisipasi masyarakat terutama yang ada di sekitar hutan, serta mereka yang terkait dengan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam mewujudkan program-program pembangunan LHK, maka Prioritas pembangunan KLHK berdasarkan Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019 adalah :

- Peningkatan Produk Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan:
- Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu
- Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu
- Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS :
- Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan
- Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
- Peningkatan Pengelolaan DAS:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Kehati adalah :

- IKLH meningkat menjadi 66,5-68,6 di tahun 2019;
- Meningkatnya pemanfaatan Iptek dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati sebesar 100%;
- Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan;
- Menurunnya emisi GRK di 5 sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi dan industri dan limbah) sebesar mendekati 26% di tahun 2019;
- Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 daerah rentan yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN API.

Untuk mewujudkan program LHK tersebut salah satu upaya yang ditempuh diantaranya adalah dengan menghimpun data dan informasi dari wilayah kerja penyuluhan kehutanan baik yang menyangkut data fisik maupun non fisik dan identifikasi factor penentu atau permasalahan yang ditemui.

Bentuk nyata informasi yang dapat diperoleh adalah dapat dilihat dari program penyuluhan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan, Nomor : P.78/Menhut/II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan, oleh karena itu Program Penyuluhan Kehutanan merupakan pernyataan tertulis mengenai kegiatan Penyuluhan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Program Penyuluhan ini disusun sebagai acuan kegiatan penyuluhan, yang merupakan agenda pokok untuk melaksanakan urusan teknis di sektor pembinaan dan Penyuluhan kepada sasaran penyuluhan yang dengan tujuan sebagai berikut :

- Mengembangkan Sumberdaya penyuluh kehutanan dan petani hutan serta memampatkan sumberdaya alam dan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan peluang pasar.;
- Menyelenggarakan Penyuluhan dalam rangka alih teknologi;
- Menumbuhkembangkan kavasitas kelompok tani hutan yang ada di wilayah provinsi Banten, agar mampu berusaha yang lebih baik dan menguntungkan sehingga kesejahteraan meningkat.;
- Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM Penyuluh Kehutanan, PKSM pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan.;
- Menyediakan acuan/ juklak /Juknis penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
- Memberikan acuan bagi para penyuluh kehutanan dalam menyusun rencana kegiatan.
- Masalah umum adalah fenomena yang menjadikan penghambat penyelenggaraan penyuluhan dan berdampak terhadap keberhasilan kegiatan Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi Banten.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam penyelenggraan penyuluhann diantaranya adalah:

- Jumlah tenaga penyuluh tidak sebanding dengan sasaran penyuluhan, Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah penyuluh Kehutanan yang semakin berkurang sedangkan sasran penyuluhan yang begitu luas, bahkan lahan kritis hasil kajian masih terdapat hampir 193 000 Ha. Jumlah Penyuluh kehtanan saat ini 26 orang untuk mendampingi 505 desa dari 71 kecamatan di kab Pandeglang, lebak dan Serang.
- Tata batas pemilikan lahan tidak jelas, keadaan ini menjadi problematika di sekitar kawasan hutan, karena akan berpotensi terjadi menyerobotan kawasan hutan sebagai lahan pertanian.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penyuluhan. Hal ini karena sapras penyuluh dalam bentuk sepeda motor dan yang lainnya yang berasal dari aset daerah kabupaten, sarana tersebut harus dikembalikan, karena status penyuluhan menjadi kewenangan provinsi

berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, disamping itu kondisi sapras sepeda motor yang berasal dari pusat (Kemen LHK) kondisinya sudah banyak yang tidak layak digunakan untuk kelapangan(rusak)

- Banyaknya lahan guntai/ terlantar, keadan ini diperlukan keterlibatan berbagai pihak untk memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh HGU menjadi kawasan produktif, karena kondisi ini menjadi kendala dalam menurunkan luasan lahan kritis kalau tidak segera di tangani.
- Penerapan teknologi tepat guna belum optimal. Karya pelaku utama dalam memproduksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Teknologi Tepat Guna yang dilakukan masih harus mendapatkan pengakuan dalam hak patent, agar tidak di tiru oleh yang lain, hal ini akan mendorong petani hutan untuk terus mengembangkan inovasinya.
- Peran serta wanita dalam PSDA belum optimal. Kegiatan pembangunan Kehutanan masih didominasi oleh kaum pria walaupun peranan gender dapat dijalankan dalam mendukung progra pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, seperti halnya peranan kaum wanita dalam memanfaatkan limbah untuk berbagai kerajinan tangan dalam bentuk souvenir. Gerakan pengisian polibag untuk persemaian dapat menggunakan ibu-ibu sebagai tenaga kerja

Dengan melihat tujuan dan permasalahan yang dihadapi oleh kegiatan penyuluhan, maka produksi hasil Hutan Rakyat berupa kayu, penyediaan bibit kayu-kayuan (albasia) dan Hasil Hutan Bukan kayu (Jamur, Madu, propolis, meja akar dll) dapat dijadikan acuan para meter keberhasilan penyuluhan kehutanan. Oleh karena itu untuk mendukung keberhasilan program penyulhan kehutanan dibutuhkan tenaga penyuluh yang profesional.

Serang, 31 Januari 2018

-----sep-----

*) Penyuluh Kehutanan, DLHK Banten)